

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan kemajuan teknologi, globalisasi, serta dinamika perekonomian dunia. Persaingan antar perusahaan semakin ketat, mendorong setiap organisasi untuk menyusun dan menerapkan strategi bisnis yang tepat demi mencapai keunggulan kompetitif. Dalam konteks tersebut, kinerja keuangan menjadi indikator penting yang mencerminkan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk menghasilkan laba dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Menurut Rudiyanto (2018), kinerja keuangan merupakan hasil yang dicapai manajemen dalam menjalankan fungsi pengelolaan aset perusahaan, yang dapat menjadi bahan evaluasi tingkat keberhasilan operasional perusahaan.

Salah satu rasio utama dalam menilai kinerja keuangan adalah Return on Assets (ROA), yaitu rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya (Kasmir, 2019). ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi penggunaan aset dan menjadi sinyal positif bagi investor, sementara ROA yang rendah dapat mengindikasikan kelemahan dalam pengelolaan aset perusahaan.

Di Indonesia, sektor manufaktur masih menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2022 sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 19,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), menjadikannya sektor



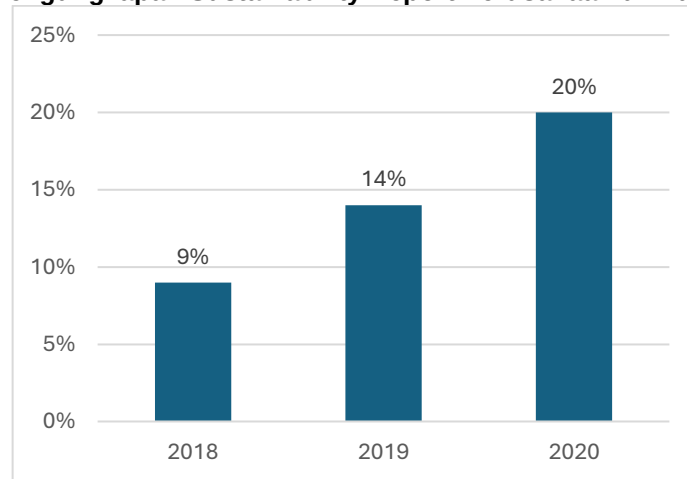
penyumbang terbesar. Sektor ini terbagi ke dalam beberapa sub-sektor, salah satunya adalah industri bahan dan kimia dasar yang mencakup produsen bahan kimia, pupuk, petrokimia, dan sejenisnya. Sub-sektor ini memiliki karakteristik khusus karena proses produksinya berskala besar, mengonsumsi energi tinggi, dan menghasilkan limbah serta emisi yang berdampak langsung terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan dalam sub-sektor ini memiliki tanggung jawab besar untuk menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan.

Pelaporan keberlanjutan atau *sustainability report* merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada pemangku kepentingan atas dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dari aktivitas bisnisnya. Sejak diberlakukannya POJK No. 51/POJK.03/2017, perusahaan publik diwajibkan untuk menerbitkan laporan keberlanjutan sebagai bagian dari transparansi informasi kepada publik.

Namun demikian, tingkat kepatuhan terhadap aturan ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari OJK (2020), dalam kurun waktu tiga tahun pasca diberlakukannya regulasi tersebut, persentase perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan masih relatif kecil dan mengalami pertumbuhan yang lambat, seperti ditunjukkan pada data berikut:



Tabel 1.1
Presentase Pengungkapan Sustainability Report Perusahaan di Indonesia



Sumber : OJK (2020)

Pada tahun 2018, hanya **9%** dari total perusahaan yang menerbitkan sustainability report. Angka ini meningkat menjadi **14%** pada 2019 dan **20%** pada 2020. Artinya, meskipun sudah ada regulasi yang mewajibkan, **mayoritas perusahaan belum sepenuhnya menyadari pentingnya pelaporan keberlanjutan**, baik sebagai bentuk transparansi maupun sebagai strategi peningkatan nilai perusahaan. Salah satu penyebabnya adalah adanya anggapan bahwa pembuatan sustainability report membutuhkan biaya tambahan serta kurangnya kesadaran terhadap dampak operasional terhadap lingkungan dan sosial (Octavia et al., 2022).

Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa keberadaan laporan keberlanjutan dapat meningkatkan reputasi perusahaan, memperkuat kepercayaan investor, serta berdampak positif terhadap kinerja keuangan. Misalnya, studi oleh Purwanti et al. (2022) pada perusahaan sub-sektor kimia dasar selama 2020–2022 menemukan bahwa biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap ROA, yang berarti bahwa komitmen terhadap keberlanjutan tidak hanya bersifat positif tapi juga menguntungkan secara finansial.



Untuk memperkuat temuan tersebut, berikut disajikan data Return on Asset (ROA) dari 10 perusahaan manufaktur sub-sektor bahan dan kimia dasar selama periode 2021–2023:

Tabel 1.2
Return on Asset Perusahaan Manufaktur subsektor Industri Bahan dan Kimia
Dasar periode 2021-2023

No	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	Return on Asset		
			2021	2022	2023
1	AGII	PT SAMATOR GAS INDONESIA	0.26%	1.29%	2.18%
2	SMGR	PT SEMEN INDONESIA	2.72%	3.01%	2.81%
3	TKIM	PT TJIWI KIMIA	6.58%	13.07%	4.77%
4	INKP	PT INDAH KIAT PULP & PAPER	5.87%	8.89%	4.06%
5	BRPT	PT BARITO PACIFIC	3.20%	0.35%	0.98%
6	ARNA	PT ARWANA CITRA MULIA	21.22%	22.55%	17.14%
7	MLIA	PT MULIA INDUSTRINDO	10.57%	12.54%	8.02%
8	TOTO	PT SURYA TOTO INDONESIA	4.93%	9.48%	7.27%
9	SRSN	PT INDO ACIDATAMA	3.09%	3.84%	6.19%
10	IGAR	PT CHAMPION PACIFIC INDONESIA	12.85%	11.85%	6.23%

Sumber: data diolah

Data tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan (dalam bentuk ROA) perusahaan-perusahaan di sub-sektor ini sangat bervariasi dan mengalami fluktuasi setiap tahun. Hal ini menunjukkan pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan tersebut, termasuk keberadaan sustainability report dan praktik tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Di samping pelaporan keberlanjutan, praktik Good Corporate Governance (GCG) juga menjadi perhatian penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan. Dua komponen utama GCG yang sering s adalah dewan komisaris independen dan kepemilikan anal. Dewan komisaris independen berfungsi sebagai pengawas



dan pengendali terhadap kebijakan manajemen, sedangkan kepemilikan institusional cenderung memiliki kepentingan jangka panjang dan mendorong perusahaan untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel. Beberapa penelitian menemukan bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, namun sebagian lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau bahkan negatif, seperti yang disampaikan oleh Tamara & Khairani (2023) dan Febriana (2022).

Selain itu, ukuran perusahaan (company size) juga berperan penting dalam konteks ini. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya lebih besar untuk menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan GCG secara optimal. Mereka juga memiliki struktur organisasi yang lebih matang dalam mengantisipasi risiko serta peluang, sehingga kinerja keuangannya cenderung lebih stabil. Oleh karena itu, ukuran perusahaan perlu dipertimbangkan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Terlepas dari upaya regulasi dan peningkatan kesadaran, masih ditemukan kasus-kasus pelanggaran lingkungan oleh perusahaan besar. Berdasarkan laporan Environmental Performance Index 2022 (EPI) Indonesia telah dianggap sebagai salah satu negara terburuk dalam hal pelestarian lingkungan di skala global. EPI mengukur tingkat keberlanjutan lingkungan negara-negara melalui puluhan indikator yang terangkum dalam tiga pilar besar yaitu kesehatan lingkungan, iklim dan daya hidup ekosistem. Hasilnya, Indonesia mendapat skor 28,2 dari 100. Skor ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-164 dari 180 negara yang diriset (Ahdiat, 2022). Salah satu kasus yang terjadi telah disebutkan pada salah satu riset oleh WALHI Jawa Timur, dimana pada tahun 2022 mereka melakukan riset dan kampanye untuk mendukung jaringan warga Blitar yang terkena dampak pencemaran limbah peternakan PT. Greenfields. Sejak tahun 2017 PT Greenfields Indonesia telah melakukan pencemaran pada lahan di sekitarnya. Dampak pencemaran ini dirasakan langsung oleh



warga yang tinggal di sekitar area farm ataupun yang jauh dari area farm. Pada laporan riset ini secara garis besar menunjukkan temuan bahwa pencemaran yang dilakukan oleh PT Greenfields memiliki dampak yang luas, selain kerusakan ekosistem, juga mengakibatkan dampak sosial seperti konflik agraria. Akibat kasus-kasus seperti ini perusahaan mendapatkan tuntutan dan desakan dari para pemangku kepentingan untuk menjamin bahwa perusahaan melakukan segala aktivitasnya dengan tujuan keberlangsungan hidup (going concern), serta memperhatikan isu terkait dengan lingkungan dan sosial. Penggunaan laporan keberlanjutan juga turut membantu perusahaan berkomunikasi secara efektif dengan pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi perusahaan, serta memberikan legitimasi mereka di masyarakat (Kiliç et al., 2015; Pope & Lim, 2019). Oleh karena itu, pengungkapan laporan keberlanjutan ini sangat penting keberadaannya dalam suatu perusahaan (Kuzey & Uyar, 2017; Orazalin & Mahmood, 2018).

Penelitian terdahulu meyakini laporan keberlanjutan memiliki manfaat diantaranya untuk meningkatkan reputasi, strategi pengelolaan risiko operasional, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan keunggulan kompetitif, yang pada akhirnya berdampak pada kinerja keuangan dan nilai perusahaan (Limarwati et al., 2024). Selain itu berdasarkan Tamara & Khairani (2023) menyatakan bahwa Sustainability Report tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Penelitian lain Febriana (2022) mengungkapkan Good corporate governance berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan terutama pada indikator Dewan Komisaris Independen. Dewan komisaris memiliki peranan penting dalam mengawasi pelaksanaan strategi perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan. Semakin banyak Dewan Komisaris pada suatu perusahaan maka tindak kecurangan



perusahaan tersebut dapat diminimalisir karena fungsi monitoring dapat dijalankan dengan maksimal oleh Dewan Komisaris.

Selain itu, pada penelitian oleh Cahyati et al (2024) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan adanya kepemilikan oleh institusi yang besar akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal dalam memonitoring manajemen, tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, dan juga dalam menggunakan utang sebagai sumber pendanaan, perusahaan mampu dalam menangani resiko yang timbul dari penggunaan utang. Dengan adanya kemampuan tersebut, perusahaan dapat memaksimalkan peran utang untuk menghasilkan profitabilitas.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa penelitian-penelitian tersebut memperoleh hasil yang tidak konsisten, sehingga perlu dilakukan kajian dan penelitian kembali tentang pengaruh sustainability report dan GCG terhadap kinerja keuangan dengan ukuran Perusahaan sebagai variable moderasi.

Berkaitan dengan fenomena dan juga dimotivasi oleh penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin mengangkat kembali penelitian tentang Persistensi Laba dan variabel yang mempengaruhinya tersebut dengan judul **“Analisis Pengaruh Sustainable Report dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2021-2023”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Sustainable report berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah Good Corporate Governance yang diwakili oleh dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan?



3. Apakah Good Corporate Governance yang diwakili oleh kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah ukuran Perusahaan mampu memoderasi hubungan antara Sustainable report, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Sustainable report terhadap kinerja keuangan
2. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance yang diwakili oleh dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan
3. Untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance yang diwakili oleh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan
4. Untuk mengetahui peran moderasi ukuran Perusahaan terhadap hubungan antara Sustainable report, dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Pembaca hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah maupun memperkaya teori mengenai kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini diharapkan pula dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya di bidang akuntansi keuangan.



1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam peningkatan dan perbaikan kinerja dari perusahaan dimasa depan, agar mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran umum tentang isi proposal tesis ini, maka peneliti menyusunnya dalam empat bab, dalam setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab, kemudian antara bab yang satu dengan bab yang lainnya akan saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I:

PENDAHULUAN Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II:

TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan pustaka dari beberapa variabel yang menjadi landasan penelitian.

BAB III:

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS Pada bab ini berisikan kerangka fikir dan hipotesis penelitian

BAB IV:



E PENELITIAN Bab ini berisikan rancangan penelitian, lokasi dan enelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian dan teknik analisis data.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi didefinisikan oleh Suchman (1995) sebagai berikut: "Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions".

Teori legitimasi berasal dari teori organisasi dan sering dikaitkan dengan perspektif sistem terbuka. Organisasi dilihat sebagai bagian dari masyarakat yang lebih luas dan keberlanjutannya tergantung pada kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial. Teori legitimasi berakar pada konsep kontrak sosial, yaitu hubungan antara organisasi dan masyarakat di mana organisasi harus memenuhi ekspektasi sosial untuk mempertahankan operasinya (Suchman, 1995).

Suchman (1995) mengidentifikasi tiga tipe legitimasi, yaitu:

1. Legitimasi Pragmatis (Pragmatic Legitimacy)

Legitimasi ini berdasarkan pada manfaat praktis yang diperoleh oleh pihak yang terlibat dengan organisasi. Pemangku kepentingan menerima dan mendukung organisasi karena mereka mendapatkan keuntungan langsung atau manfaat praktis dari hubungan tersebut. Contohnya adalah pelanggan yang membeli produk karena mereka mendapatkan nilai atau manfaat dari produk tersebut.

2. Legitimasi Moral (Moral Legitimacy)

Legitimasi moral berfokus pada nilai-nilai etika atau moral yang diyakini masyarakat. Organisasi memperoleh legitimasi moral jika tindakannya dianggap benar secara moral dan sesuai dengan norma-



norma sosial yang berlaku. Contoh dari legitimasi moral adalah perusahaan yang menjalankan program tanggung jawab sosial (CSR) yang melibatkan pengurangan polusi atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3. Legitimasi Kognitif (Cognitive Legitimacy)

Legitimasi kognitif terjadi ketika organisasi dipandang sebagai entitas yang "wajar" atau "normal" dalam konteks sosial. Hal ini terjadi ketika organisasi atau tindakan organisasi dianggap sebagai sesuatu yang diterima menjadi bagian dari realitas sosial. Contoh dari legitimasi kognitif adalah perusahaan yang bergerak dalam industri tertentu yang sudah mapan dan diakui, seperti perusahaan teknologi besar atau perusahaan yang beroperasi dalam sektor energi terbarukan

Masyarakat modern memandang bahwa suatu organisasi dibangun berdasarkan pada hubungan kontrak yang memfasilitasi rasionalisasi perilaku organisasi sesuai dengan norma sentral dari suatu sistem fungsional (ekonomi, politik, hukum, agama, kesejahteraan, keluarga, dan lain-lain) (Rendtorff, 2022:371). Suatu perusahaan mempunyai legitimasi jika perilaku perusahaan tersebut diakui telah sesuai dengan standar umum, kebiasaan, aturan dan menjunjung tinggi etika bisnis (Rendtorff, 2022:1249).

Deegan (2002) menyatakan bahwa teori legitimasi dalam konteks pelaporan keberlanjutan digunakan dalam pengungkapan informasi keberlanjutan dan pengelolaan reputasi. Pengungkapan informasi keberlanjutan dalam laporan keberlanjutan merupakan sebagai wujud kepatuhan organisasi terhadap ekspektasi masyarakat terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pengelolaan reputasi digunakan untuk memitigasi ancaman dari insiden tertentu (misalnya, tumpahan atau pencemaran lingkungan). Organisasi cenderung mengelola melalui peningkatan transparansi atau memperbaiki citranya dengan laporan tambahan.



2.2 Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Pemangku kepentingan (stakeholder) didefinisikan oleh Freeman (1984:46) sebagai: “any group or individual who can affect or is affected by the achievement of an organization’s objectives”.

Menurut Parmar (2010) pemangku kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu pemangku kepentingan utama (primary stakeholders) dan pemangku kepentingan sekunder (secondary stakeholders). Pemangku kepentingan utama (primary stakeholders) merupakan pihak yang memiliki hubungan langsung dan fundamental dengan perusahaan, yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan dan sebaliknya dipengaruhi langsung oleh aktivitas perusahaan, diantaranya adalah pemegang saham, karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah. Pemangku kepentingan sekunder (secondary stakeholders) merupakan pihak yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan utama perusahaan tetapi memiliki pengaruh atau dipengaruhi oleh keputusan perusahaan, seperti media dan komunitas lokal.

Donaldson dan Preston dalam Bridoux & Stoelhorst (2022) mengidentifikasi tiga jenis teori pemangku kepentingan, yaitu: deskripsi yang menggambarkan mengenai apa yang dilakukan manajer ketika mengelola pemangku kepentingan, aktivitas perusahaan mengenai apa yang harus dilakukan manajer berdasarkan prinsip moral dan filosofis, dan pekerjaan instrumental yang menjelaskan hubungan antara pengelolaan pemangku kepentingan dan kinerja perusahaan.

Asumsi dasar teori pemangku kepentingan adalah bahwa organisasi tidak dapat beroperasi tanpa hubungan yang saling mempengaruhi dengan pihak. Secara eksplisit teori pemangku kepentingan mengandung penciptaan nilai (dimensi ekonomi), pengelolaan hubungan (dimensi etika) dan keadilan (dimensi moral), sebagai suatu strategi manajemen



dalam mengelola hubungan perusahaan dan pemangku kepentingan yang penting (Bridoux & Stoelhorst, 2022). Teori pemangku kepentingan (stakeholder theory) menyatakan bahwa perusahaan memiliki akuntabilitas tidak hanya kepada pemegang saham, namun juga kepada berbagai pemangku kepentingan seperti kreditur, pelanggan, pemasok, karyawan, pemerintah, masyarakat, lingkungan, generasi mendatang, dan lain-lain (Ebaid, 2023).

Perusahaan yang bertanggung jawab adalah perusahaan yang mampu menyediakan produk yang baik dan aman, menghasilkan produk dengan harga yang wajar, tepat waktu membayar pemasoknya, memperlakukan karyawannya dengan baik, menghormati komunitas lokal, membayar kewajiban seperti yang dijanjikan, memberi pengembalian yang wajar kepada pemegang sahamnya, patuh kepada hukum yang berlaku, dan menunjukkan perilaku yang dapat dipercaya dalam interaksinya dengan semua pemangku kepentingannya (Barney & Harrison, 2020).

Menurut Barney & Harrison (2020), teori stakeholder sering digunakan dalam ilmu akuntansi untuk menjelaskan pengungkapan informasi yang lebih luas dari sekadar laporan keuangan. Hal ini meliputi:

1. Pelaporan Keberlanjutan

Perusahaan menggunakan laporan keberlanjutan untuk menunjukkan tanggung jawab non finansial kepada stakeholder, seperti masyarakat lokal dan lingkungan.

2. Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi yang mungkin timbul dari kegagalan untuk mematuhi harapan sosial dapat dimitigasi, jika perusahaan dapat memenuhi kebutuhan stakeholder.



ambilan Keputusan Strategis

Teori stakeholder menyatakan laporan perusahaan mencerminkan komitmen perusahaan untuk memenuhi ekspektasi semua stakeholder, bukan hanya pemegang saham.

Perusahaan yang mengadopsi teori stakeholder cenderung mengintegrasikan keberlanjutan dalam model bisnis mereka. Contohnya adalah penggunaan bahan baku ramah lingkungan untuk memenuhi harapan komunitas dan pemerintah serta penyediaan program pengembangan masyarakat lokal untuk membangun hubungan jangka Panjang.

2.3 Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report)

Istilah keberlanjutan pertama kali didefinisikan dalam Laporan Brundtland sebagai proses keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan sosial (Amrigan et al, 2023). Standar Global Reporting Initiative (GRI) mendefinisikan laporan keberlanjutan sebagai praktik pelaporan organisasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, serta termasuk kontribusinya baik positif maupun negatif terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan secara transparan (GRI, 2020). POJK No. 51/POJK.03/2017 mendefinisikan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) sebagai “laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan Lingkungan Hidup suatu LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan”.

Laporan keberlanjutan memfasilitasi perusahaan untuk memuaskan kepentingan para pemangku berkepentingan, membangun dan melindungi reputasi perusahaan, serta berupaya untuk mewujudkan manfaat yang ada kinerja keuangan (Goel, 2019). Manfaat tersebut dapat jika organisasi memiliki komitmen terhadap keberlanjutan melalui



transparansi dan akuntabilitas pengungkapan informasi dalam laporan keberlanjutan (Dincer et al., 2023).

Menurut Nugroho et al (2023) perusahaan yang menerapkan keberlanjutan dalam operasinya akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Mengurangi resiko bisnis dan meningkatkan peluang bisnis.
2. Mendapatkan dan mempertahankan lisensi entitas untuk beroperasi dan tumbuh.
3. Meningkatkan kinerja operasional dan efisiensi.
4. Meningkatkan daya tarik dan loyalitas tenaga kerja. T
5. Merjaganya keamanan operasi.
6. Meningkatnya pengakuan dan reputasi brand.
7. Meningkatnya kemampuan untuk perencanaan strategic jangka panjang.

Beragam standar global pelaporan keberlanjutan yang hingga saat ini digunakan oleh perusahaan di dunia. GRI merupakan standar global bagi organisasi dalam pengungkapan informasi yang signifikan berdampak pada aspek ekonomi, lingkungan dan sosial sesuai tujuan laporan keberlanjutan (GRI, 2020). Selain GRI, terdapat standar global lainnya yaitu diantaranya Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Sustainable Development Goals (SDG), ClimateRelated Financial Disclosure (TCFD), International Integrated Reporting Council (IIRC) dan IFRS S1 (International Financial Reporting Standards Sustainability 1) dan S2.

Khusus di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan regulasi mengenai keuangan keberlanjutan berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 dan SEOJK 16/POJK.04/2021 mengenai & Isi Laporan Tahunan Emiten & Perusahaan Publik. Peraturan memberikan pedoman bagaimana Emiten dan Lembaga Jasa



keuangan mengungkapkan informasi mengenai keberlanjutan dalam laporan keberlanjutan tersendiri atau dalam laporan tahunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan regulasi mengenai keuangan keberlanjutan berdasarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 dan SEOJK 16/POJK.04/2021 mengenai Bentuk & Isi Laporan Tahunan Emiten & Perusahaan Publik. Peraturan tersebut memberikan pedoman bagaimana Emiten dan Lembaga Jasa keuangan mengungkapkan informasi mengenai keberlanjutan dalam laporan keberlanjutan tersendiri atau dalam laporan tahunan.

GRI mendisain struktur GRI Standards terdiri atas Standar Universal dan Standar Topik Spesifik. Standar Universal meliputi GRI 101 (Landasan), GRI 102 (Pengungkapan Umum) dan GRI 103 (Pendekatan Manajemen). GRI 101 merupakan fondasi bagi organisasi untuk menggunakan Standar GRI karena memuat informasi penting tentang cara menggunakan dan merujuk Standar GRI. GRI 102 merupakan pengungkapan umum oleh organisasi untuk melaporkan informasi tentang organisasi dan praktik pelaporan keberlanjutan. Sedangkan GRI 103 merupakan pengungkapan informasi mengenai pendekatan manajemen terhadap setiap topik-topik material dalam aspek ekonomi, lingkungan dan sosial. (GRI, 2020).

Indikator pengungkapan sustainability report yang tertuang dalam peraturan OJK.No.51/POJK.03/2017 tersebut mengungkapkan 3 aspek, ekonomi, lingkungan, dan sosial sebagai berikut :

1. Aspek Ekonomi

Pengungkapan ekonomi merupakan pengungkapan mengenai dampak kondisi ekonomi organisasi terhadap pemangku kepentingan dan pada aspek ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global (Amrigan et al, 2019: 10). Aspek ekonomi membahas mengenai aliran modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda beserta dampak ekonomi yang



utama pada seluruh masyarakat, sehingga pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi mengenai dampak suatu organisasi terkait kinerja ekonomi dan bagaimana organisasi mengelolanya (GRI, 2020). GRI Standards mengungkapkan aspek ekonomi meliputi pengelolaan kinerja ekonomi, keberdaan pasar (kontribusi terhadap pembangunan ekonomi di daerah setempat atau komunitas di mana beroperasi), dampak ekonomi tidak langsung sebagai konsekuensi dari dampak langsung pada transaksi keuangan dan aliran uang diantara organisasi dan pemangku kepentingannya, praktik pengadaan yang melibatkan pemasok lokal, pemasok perempuan atau pemasok yang masuk kelompok rentan, praktik anti korupsi dan anti persaingan usaha, serta tata kelola kepatuhan terhadap pajak.

2. Aspek Lingkungan

Pengungkapan lingkungan berhubungan dengan dampak langsung terhadap aktivitas perusahaan pada ekosistem, baik yang hidup maupun yang tidak hidup (Amrigan et al, 2023). GRI Standards mengungkapkan aspek lingkungan meliputi penggunaan dan pengelolaan terhadap bahan material, energi, air dan limbah, keanekaragaman hayati dan emisi, termasuk bagaimana pengelolaan kepatuhan terhadap lingkungan serta penilaian terhadap pemasoknya.

3. Aspek Sosial

Pengungkapan sosial merupakan pengungkapan yang berkaitan dengan dampak organisasi terhadap masyarakat sekitar dan risikonya dihadapi oleh organisasi (Amrigan et al, 2023).

GRI Standards mengungkapkan aspek sosial meliputi topik mengenai pekerja, pengelolaan hubungan dengan pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan Pendidikan, keanekaragaman dan kesempata, non diskriminasi, kebebasan berserikat dan organ kolektif, pekerja anak, kerja paksa, praktik keamanan, hak adat, penilaian hak asasi manusia, keterlibatan masyarakat, penilaian sosial pemasok, kebijakan publik, kesehatan dan



keselamatan pelanggan, pemasaran dan pelabelan produk, privasi pelanggan, serta kepatuhan pada sosial ekonomi.

Tabel 2.1
Indikator Sustainability Report OJK

Apek Ekonomi	Aspek Lingkungan	Aspek Sosial
1. Kegiatan membangun budaya ekonomi berkelanjutan di internal 2. Target dan realisasi kinerja produk 3. Target dan realisasi portofolio 4. Target dan realisasi pembiayaan. 5. Target dan realisasi investasi 6. Target dan realisasi instrumen keuangan 7. Target dan realisasi pendapatan 8. Target dan realisasi laba rugi 9. Target dan realisasi proyek yang sejalan dengan penerapan keuangan keberlanjutan. 10. Inovasi pengembangan jasa/produk 11. Peristiwa yang merugikan	1. Membangun budaya lingkungan berkelanjutan di internal. 2. Biaya lingkungan hidup 3. Penggunaan material ramah lingkungan. 4. Penggunaan energi 5. Emisi 6. Air. 7. Dampak operasional bank terhadap keanekaragaman hayati 8. Keanekaragaman hayati 9. Upaya konservasi keanekaragaman hayati. 10. Limbah. 11. Pengelolaan limbah 12. Jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan	1. Membangun budaya sosial berkelanjutan di internal 2. Peristiwa kejahatan keuangan yang dilakukan pihak internal dan eksternal. 3. Upaya mitigasi tindakan kejahatan keuangan 4. Pengelolaan risiko bisnis 5. Pelayanan atas jasa/produk kepada konsumen. 6. Pernyataan kesetaraan kesempatan kerja. 7. Pernyataan ada/tidak tenaga kerja paksa atau tenaga kerja anak. 8. Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional. 9. Lingkungan kerja yang layak dan aman. 10. Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai.



		11. Informasi kegiatan yang berdampak positif dan negatif terhadap masyarakat. 12. Literasi dan inklusif keuangan 13. Mekanisme pengaduan masyarakat. 14. Jenis dan capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat 15. Inovasi pengembangan produk. 16. Survey kepuasan pelanggan terhadap produk/jasa keuangan
--	--	--

Sumber: Standar *Global Reporting Initiative*

Indikator sustainability report sektor bisnis perbankan di atas, merincikan masing-masing indikator ke dalam spesifikasi menurut core business, sehingga secara umum beberapa aspek dalam GRI tidak disertakan dalam indikator sustainability report bisnis perbankan. Sehubungan dengan pengungkapan keberlanjutan ekonomi, lingkungan, dan sosial bisnis perbankan, digunakan perhitungan untuk menentukan nilai masing-masing indikator. Setiap item yang diungkapkan diberi skor 1 (satu), dan setiap item yang tidak diungkapkan diberi skor 0 (nol). Rumusan penilaian indikator sustainability sebagai berikut :

a. Aspek Ekonomi

$$AE = \frac{K}{N} \times 100\%$$

↳ Lingkungan

$$\frac{K}{N} \times 100\%$$

↳ Sosial

$$= \frac{K}{N} \times 100\%$$



Penjelasan :

AE = Aspek Ekonomi

AL = Aspek Lingkungan

Aso = Aspek Sosial

K = Jumlah item yang tidak diungkapkan

N = Jumlah item yang diharapkan diungkapkan

Sumber: Standar *Global Reporting Initiative*

2.4 Good Corporate Governance

Mengacu pada Forum untuk Tata Kelola Perusahaan Indonesia (FCGI: 2004)“ Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajemen, kreditor, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya internal atau eksternal dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban, atau merupakan sistem di perusahaan mana yang memerintah dan mengendalikan”.

Cadbury Committee yang dikutip Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan : “Good Corporate Governance sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER — 01



PER/01/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1, mengatur “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang

mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundangundangan dan etika berusaha”.

Praktik Good Corporate Governance akan berperan substitutif dalam situasi di mana perusahaan mengurangi perilaku oportunistiknya dan mencoba menurunkan tingkat asimetri informasi yang ada antara manajer dan pemegang saham (Asogwa et al. : 2013).

Prinsip Corporate Governance di Indonesia dengan Keputusan Menteri BUMN No. Kep16/MMBU/2012 tentang penerapan praktik good corporate governance pada BUMN pada Bab II pasal 3 meliputi lima prinsip yaitu: (1) Transparency, (2) Accountability, (3) Responsibility, (4) Independency, dan (5) Fairness.

Dasar pedoman tata kelola perusahaan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2015 yang tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka sebagai standar penerapan GCG, yaitu meliputi 5 (lima) aspek yang diturunkan ke dalam 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi. Aspek-aspek dan prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hubungan perusahaan terbuka dengan pemegang saham dalam menjamin hak-hak pemegang paham;
2. Fungsi dan peran dewan komisaris;
3. Fungsi dan peran Direksi;
4. Partisipasi pemangku kepentingan; dan
5. Keterbukaan Informasi.

Adapun prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) berdasarkan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER01/MBU/2011 dalam Sudarmanto et al., (2021, p. 24) adalah :



transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (responsibility) , yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang - undangan dan prinsip - prinsip korporasi yang sehat.
4. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan dan prinsip - prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak - hak Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Penerapan sistem Good Corporate Governance (GCG) yang baik diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan melalui tujuan sebagai berikut (Rivai & Ismail, 2013) :

1. Meningkatkan keberhasilan suatu organisasi.
2. Meningkatkan legalitas organisasi yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Melindungi hak dan kewajiban stakeholders.

2.5 Dewan Komisaris Independen

Pengertian Dewan Komisaris Independen yang dikemukakan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mengenai Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yaitu, Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus sesuai pada anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris independen dapat mewujudkan pelaksanaan dalam Good Corporate Governance, adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan akan mendorong diterapkannya prinsip Good Corporate Governance sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Candradewi, 2019).



Dewan komisaris adalah inti dari Corporate Governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, asistensi manajemen mengelola perusahaan, dan wajib terlaksananya

akuntabilitas (Franita, 2018). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, keanggotaan dewan komisaris paling kurang terdiri dari dua orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib memiliki paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Demikian indikator untuk mengukur dewan komisaris independen yaitu, jumlah dewan komisaris independen dibagi jumlah anggota dewan komisaris (Hidayat et al., 2021).

$$DKI = \frac{\text{Jumlah Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

Sumber: Hermawan (2009); Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001)

2.6 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusional lainnya (Hery, 2017, p. 30). Pemegang saham institusional biasanya memiliki pengalaman yang lebih baik dalam bisnis keuangan. Pemilik institusi memiliki kemampuan untuk memonitor sehingga manajemen mengurangi perilaku yang dapat menurunkan kualitas laba (Pratomo & Nuraulia, 2021). Investor institusional relatif memegang saham mayoritas di banyak perusahaan dan mereka juga investor aktif. Dengan demikian, memiliki suara dalam rapat pemegang saham, mereka memilih perwakilan mereka di dewan, memastikan kontrol yang lebih baik atas eksekutif dan manajemen. Melalui kehadiran perwakilan mereka, investor institusional mempengaruhi sistem tata kelola perusahaan dan fungsi perusahaan, dan dalam melakukan ini, mereka secara efektif melindungi kepentingan pemegang saham (Magnanelli & 021, p. 54).



Menurut Andini et al., (2021, p. 18) keberadaan investor institusional mampu melakukan pengawasan yang lebih baik terhadap setiap

keputusan yang diambil oleh manajemen daripada investor individual. Kepemilikan institusional mendorong adanya pengawasan yang ketat terhadap perusahaan untuk investasi yang sudah mereka tanamkan. Pengawasan yang baik tentunya akan membantu perusahaan untuk terhindar dari kesalahan manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan yang akhirnya dapat merugikan pemegang saham. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan rumus berikut:

$$KI = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham yang Beredar}} \times 100\%$$

Sumber: Hermawan (2009); Forum for Corporate Governance in Indonesia (2001)

2.7 Ukuran Perusahaan

Menurut Santoso, B. A., & Junaeni (2022) ukuran perusahaan adalah skala yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil dengan cara yang berbeda. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan dengan besarnya modal perusahaan, pendapatan dan total aset. Semakin besar perusahaan, semakin sulit keputusan pendanaan yang diambil perusahaan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan (Rosalia, et al., 2022). Pada umumnya perusahaan yang berukuran besar bahwa akan lebih mungkin untuk mendapatkan kepercayaan kreditur dalam sumber pendanaan mereka. Fungsi dari sumber pendanaan ini adalah untuk mencukupi aktivitas operasional. Lancarnya aktivitas operasional, maka akan meningkatkan keuangan perusahaan sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat (Lani, 2019).



Menurut Ukuran perusahaan (firm size) adalah besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan atau nilai

total asset. Menurut Rizkiadi, Nugroho (2020) Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel yang dipertimbangkan dalam menentukan nilai perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan cerminan total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, berarti aset yang dimiliki perusahaan pun semakin besar dan dana yang dibutuhkan perusahaan untuk mempertahankan kegiatan operasionalnya pun semakin banyak.

$$Ukuran\ Perusahaan = Ln\ (Total\ Asset)$$

Sumber: Kasmir (2017); Harahap (2015)

2.8 Kinerja Keuangan

Laporan keuangan bertujuan memberikan informasi keuangan perusahaan pada periode tertentu yang dapat digunakan oleh pengguna laporan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan. Penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan dilakukan melalui analisis kinerja keuangan sehingga pengguna laporan dapat mudah untuk mengambil keputusan (Kasmir, 2019).

Salah satau indikator yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan atau laba dalam periode tertentu atau untuk mengukur efektifitas perusahaan untuk menghasilkan laba (Kasmir, 2019).

Analisis kinerja keuangan berbasis akuntansi memiliki nilai yang lebih dapat diandalkan dibandingkan analisis kinerja keuangan berbasis pasar, karena menggunakan data akuntansi yang telah diaudit (Rahi et al., 2022). Selain itu analisis kinerja keuangan berbasis akuntansi tidak terpengaruh oleh persepsi atau spekulasi pasar, sedangkan analisis pasar cukup rentan terhadap persepsi dan spekulasi pasar (Ebaid,



Penelitian ini menggunakan alat analisis rasio profitabilitas yaitu Return on Assets (ROA). ROA menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk menghasilkan laba (Chandra & Augustine, 2019).

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Asset} \times 100\%$$

Sumber: Kasmir (2017); Harahap (2015)

2.9 Tinjauan Empiris

Dalam kajian pustaka akan diulas tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki isi atau relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, hal tersebut sebagai acuan dan sebagai pembanding untuk mencari perbedaan-perbedaan agar tidak terjadi adanya duplikasi. Beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Prasetio, E., & Rinova, R. (2021)	Pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor trade, service and investmen	Variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, yaitu ukuran dewan direksi dan frekuensi rapat dewan direksi. Sedangkan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Namun komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
2.	Saragih, A. E., & Sihombing, J. T. (2021)	Pengaruh Intellectual Capital, Good Corporate Governance, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja	Good corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan tidak



		Keuangan Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.	berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
3.	Cahyaningrum, S. P., Titisari, K. H., & Astungkara, A. (2022)	Pengaruh penerapan good corporate governance dan corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan perusahaan.	Good corporate governance tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan perusahaan
4.	Putra, Y. P., & Subroto, T. A. (2022)	Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.	Pengungkapan sustainability report berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
5.	Innasya, Z., Widiatmoko, J., & Indiarti, M. (2024)	Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Sustainability Report terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.	Sustainability report memberikan pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan
6.	Al Fatihah, A., & Widiatmoko, J. (2022)	Pengaruh corporate governance efficiency terhadap pengungkapan sustainability report dan dampaknya terhadap kinerja keuangan.	Pengungkapan sustainability report berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
7.	Tamara, Y., & Khairani, S. (2023)	Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report, Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan.	Hasil dari penelitian dan pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa Sustainability Report tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
	Jhaka & Obi (2021)	Sustainability reporting and	Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa



		corporate performance: Evidence from listed companies in Nigeria.	Sustainability Report memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
9.	Kyere & Ausloos (2021)	Corporate governance and firms financial performance in the United Kingdom	Variabel independen kepemilikan saham tidak berpengaruh, Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan, Dewan independen menunjukkan efek signifikan, CEO tidak terdapat signifikansi, komite audit berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan.
10.	Chalise, D. R., & Adhikari, N. R. (2022).	The Impact of Capital Structure and Firm Size on Financial Performance of Commercial Banks in Nepal	Firm Size berpengaruh terhadap kinerja keuangan

